

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini akan membahas tentang pemerintah otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer tahun 2013 yang berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Mesir sebelumnya, yaitu Muhammad Mursi. Alasan pemilihan judul ini adalah ingin mengetahui bagaimana pemeritahan Mesir yang sedang menjalani masa transisi demokrasi dari kekuasaan rezim otoriter Presiden Hosni Mubarak, justru mengalami kegagalan berdemokrasi dan berujung pada bangkitnya kembali pemerintahan otoriter baru dibawah kekuasaan rezim militer Abdel Fattah Al Sisi. Selain itu ada beberapa alasan lainnya antara lain:

Pertama, topik penulisan ini belum pernah ditulis dan dianalisis oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kedua, ketertarikan terhadap sistem pemerintahan Mesir yang mulai menjalani transisi demokrasi pasca Revolusi Mesir 2011, namun kembali menjadi sistem pemerintahan yang otoriter di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi.

Ketiga, maraknya pemberitaan media internasional perihal sikap otoriter Abdel Fattah Al Sisi dalam memimpin Mesir, terlebih pasca kudeta militer 2013 yang

berhasil menumbangkan rezim demokrasi Muhammad Mursi. Hal ini semakin menarik untuk dikaji dan dianalisis, bagaimana karakteristik pemerintah otoriter yang sedang berjalan di Mesir, di bawah kekuasaan rezim militer Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer 2013.

B. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1952 hingga tahun 2011, politik pemerintahan Mesir didominasi oleh kalangan militer. Peran dan kekuatan militer selama lebih dari 50 tahun menjadikan Mesir berada di bawah naungan rezim otoriter yang diktator. Pada tahun 1952, kepemimpinan Raja Farouk diambil alih oleh kalangan “Perwira Bebas” pimpinan Gamal Abdel Nasser. Di bawah komando Nasser, sistem pemerintahan Mesir kemudian berubah, dari Kerajaan menjadi Republik. Nasser juga bersikap otoriter terhadap gerakan Islam yang tumbuh subur di Mesir, salah satunya kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hasan al Banna pada tahun 1928. (Basyar, 2015)

Setelah Nasser meninggal dunia pada tahun 1970, kepemimpinan Mesir digantikan oleh wakil presiden, Mohammed Anwar Al Sadat. Pemerintahan yang dijalankan Sadat juga bersifat militeristik. Namun berbeda dengan Nasser yang cenderung “kiri”, Sadat membangun sistem pemerintahan sekuler yang cenderung “kanan”. Pada masa pemerintahan Nasser, Mesir dibangun dalam ideologi “Nasseris” yang sosialis nasionalis, sedangkan pada masa pemerintahan di bawah kendali Sadat,

terdapat sedikit ketebukaan ruang bagi politik dan ekonomi. Kebijakannya yang bersifat terbuka ini, ia gunakan untuk menghimpun dukungan dari gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1972, Sadat membebaskan sekelompok tahanan politik dari kalangan IM. Meski demikian dalam kesempatan lain, Sadat tetap bersikap represif terhadap gerakan Islam yang menentang pemerintahannya. Sikap otoriter Sadat yang dinilai melanggar HAM ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Kepemimpinan Sadat berakhir setelah dirinya ditembak mati oleh rakyatnya sendiri (Basyar, 2015).

Dua minggu setelah kematian Sadat, pada 14 Oktober 1981, wakil presiden Hosni Mubarak resmi menduduki kursi kepresidenan Mesir. Sebagai Mantan Komandan Angkatan Udara Mesir, tidak dapat dipungkiri lagi sikap otoriter melekat pada kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak selama 30 tahun memimpin Mesir. Hingga akhirnya gelombang revolusi Timur Tengah pada tahun 2011 berhasil menumbangkan rezim otoriter Mubarak (Basyar, 2015).

Pecahnya revolusi yang melanda negara-negara di Timur Tengah sejak awal tahun 2011, menjadi momentum merebaknya demokratisasi di kawasan strategis ini. Semula negara-negara di kawasan Timur Tengah, selama bertahun-tahun berjalan di bawah kepemimpinan rezim otoriter yang korup dan represif, seperti Presiden Zine El Abidine Ben Ali (Ben Ali) di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Muammar Khadafi di Libya.

Gelombang demokratisasi di Timur Tengah yang juga dikenal dengan sebutan *Arab Spring* atau Musim Semi Arab ini bermula dari aksi protes seorang

pemuda bernama Mohammed Bouazizi (Bouazizi) di Tunisia. Baouazizi, seorang pedagang buah melakukan aksi protes dengan jalan membakar diri karena kecewa terhadap ketidakadilan pemerintahan Presiden Ben Ali (Muttaqien, 2015). Tidak ada yang menyangka, aksi bakar diri Bouazizi ini menjadi penyulut demonstrasi besar-besaran di Tunisia hingga berujung pada penyerahan tampuk kepemimpinan Presiden Ben Ali (Nashrullah, 2015).

Pecahnya demonstrasi di Tunisia yang dikenal sebagai peristiwa Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) dengan cepat menyebar di negara-negara Timur Tengah, mulai dari Mesir, Libya, Yaman hingga ke Suriah (Rahman, 2011). Organisasi masyarakat dari berbagai kalangan dan kelompok radikal turun ke ruas jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pasalnya, sebagian besar negara di Timur Tengah menganut sistem semi demokrasi yang otoriter (Nashrullah, Propaganda Demokrasi di Tengah Musim Semi, 2015).

Seperti halnya di Negara Tunisia, dominasi pemerintahan otoriter Libya dan Mesir yang selama puluhan tahun berkuasa akhirnya tumbang menyusul lengsernya Presiden Tunisia. Di Libya, tewasnya Presiden diktator Muammar Khadafi pada 20 Oktober 2011 oleh pasukan oposisi yaitu tentara Dewan Transisi Nasional Libya atau *National Transition Council (NTC)* menjadi satu kemenangan demokrasi bagi para revolusioner. Rezim otoriter Muammar Khadafi tumbang setelah 42 tahun memimpin pemerintahan Libya (Gunawan, 2011).

Beberapa bulan sebelum jatuhnya rezim otoriter di Libya, Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun di Mesir juga terkena dampak gelombang

demokrasi. Pemerintahan Mubarak yang terkenal korup dan otoriter menjadi pemicu sejumlah aksi demonstrasi di beberapa kota di Mesir. Pecahnya revolusi Mesir pada 25 Januari 2011 ini berawal dari gerakan anti rezim-Mubarak yang digawangi para aktivis Mesir melalui jejaring sosial *Facebook*. Aktivis Mesir, Asmaa Mahfouz merilis seruan aksi protes di *Tahrir Square* pada 25 Januari 2011. Seruan aksi protes yang dirilis pada 18 Januari 2011, menjadi penggerak ribuan rakyat Mesir turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di Lapangan Tahrir, Kairo menuntut rezim otoriter Hosni Mubarak untuk turun dari jabatannya (Mandey, 2014).

Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama 18 hari di Mesir akhirnya mampu menumbangkan rezim otoriter Mubarak. Pada tanggal 11 Februari 2011, Mubarak resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah melimpahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Omar Suleiman sebagai presiden *de facto* sejak tanggal 10 Februari 2011. Berakhirnya rezim Mubarak menjadikan Mesir mengalami kekosongan pemimpin. Pemerintahan Mesir kemudian diambil alih oleh Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces-SCAF*) di bawah pimpinan Mohamed Hussein Tantawi. SCAF sepenuhnya mengontrol kekuasaan eksekutif Mesir (Abdurahman, 2014).

Jatuhnya rezim Mubarak tidak serta merta mengakhiri kekuasaan militer di Mesir. Pasca Mubarak mundur dari jabatannya, pemerintahan sementara Mesir dipegang oleh SCAF. Bahkan untuk memperkuat posisi militer, pada tanggal 30 Maret 2011 SCAF membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir. Namun rakyat Mesir dan dunia internasional tetap mendesak proses demokrasi di Mesir

untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu SCAF memberi peluang kepada elite sipil untuk masuk dalam dunia politik pemerintahan Mesir melalui pemilu (Basyar, 2015).

Kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party-FJP*) dalam tiga tahap pemilu parlemen memberikan angin segar bagi oposisi Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya dalam pemilu presiden, Partai Islam, FJP yang baru didirikan oleh Ikhwanul Muslimin pada 22 Februari 2011 ini mengusung Muhammad Mursi sebagai calon presiden. Pada 24 Juni 2012, Mursi menang dalam pemilu putaran kedua. Usai pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan bahwa anggota parlemen hasil pemilu harus dibubarkan karena Undang-undang (UU) pemilu yang mengizinkan partai politik mencalonkan anggotanya melalui jalur independen dianggap inkonstitusional. Meskipun demikian, keputusan parlemen terkait terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden dan terbentuknya 100 anggota Dewan Konstituante tetap dianggap sah untuk dijalankan. Di sisi lain, kemenangan Mursi mendorong SCAF mengeluarkan Dekrit Presiden 17 Juni 2012 sebagai upaya SCAF untuk menguasai legislatif di pemerintahan Mesir pasca pembubaran parlemen hasil pemilu (Basyar, 2015).

Untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan politik Mesir, Muhammad Mursi dari kalangan elit sipil terpilih sebagai presiden secara demokratis melalui pemilu. Hal ini menunjukkan keberlangsungan proses demokrasi di Mesir pasca tumbangannya rezim otoriter yang telah menaungi Mesir sejak tahun 1952. Meskipun demikian, pemerintahan Mursi tetap berada dalam bayang-bayang militer, dimana

SCAF tetap memiliki otoritas untuk memilih Dewan Konstituante baru (Lisbet, 2013)

Kekuatan kelompok IM yang telah terorganisir sejak pemerintahan Mesir pertama kali dipegang oleh rezim otoriter di bawah Gamal Abdel Nasser pada tahun 1952 menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi eksistensi militer di Mesir. Meluasnya pergerakan IM di tingkat nasional mengarahkan Mesir yang menganut paham liberal sekuler menuju Negara Islam (*Islamic Order/Nizam al-Islam*). Berbagai upaya dilakukan militer Mesir untuk membatasi ruang gerak IM seperti halnya pada masa kejayaan rezim otoriter. Selama puluhan tahun IM mendapat tekanan dari pemerintah. (Kartini, 2015).

Sejak dilantik menjadi Presiden Mesir pada 30 Juni 2012, Mursi menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam memulihkan anggota parlemen yang dibubarkan MK, Mursi mengeluarkan Dekrit 8 Juli 2012. Namun hal ini tidak menggoyahkan keputusan MK. Parlemen tetap dibubarkan pada 17 Juli 2012. Tidak lama berselang, Mursi kembali mengeluarkan Dekrit 12 Agustus 2012 yang berisi pembatalan kekuasaan SCAF di tingkat legislatif. Peran Militer Mesir semakin lemah, terlebih ketegangan antara Presiden Mursi dengan militer berujung pada pemecatan Kepala SCAF, Mohamed Hussein Tantawi. Hanya selang beberapa bulan, Mursi kembali mengeluarkan Dekrit 22 November 2012 yang menjadikan Mursi berkuasa hampir tanpa batas. Sikap Mursi dalam menekan kekuasaan militer Mesir akhirnya menuai protes rakyat, terutama dari kubu liberal sekuler. Pada akhirnya Mursi kembali mengeluarkan dekrit yang salah satunya

berisi pencabutan dekrit sebelumnya sebagai upaya Mursi untuk meredam protes oposisi dan rakyat Mesir (Basyar, 2015).

Pencabutan dekrit rupanya tidak menyurutkan protes dari kaum oposisi yang terlanjur anti pemerintahan Mursi. Bahkan sebelum peringatan satu tahun kepemimpinan Mursi 30 Juni 2013, pemberontakan dari kelompok oposisi liberal sekuler yang melahirkan gerakan Tammarod menuntut Mursi turun dari jabatannya. Pemerintahan Mursi telah melenceng dari jalur demokrasi yang sedang tumbuh mekar di Mesir. Sikap otoriter yang ditunjukkan Mursi menjadikan Mesir berada dalam situasi demokrasi beku (*frozen democracy*), dimana demokrasi yang tumbuh pasca Revolusi 2011 menjadi layu sebelum berkembang.

Melihat gejolak politik yang melanda Mesir, Kepala SCAF, Abdel Fattah Al Sisi akhirnya memberikan ultimatum kepada Presiden Mursi untuk menyelesaikan konflik politik dalam waktu 48 jam sejak 1 Juli 2013. Presiden Mursi tidak menyangka, Al Sisi yang telah diangkat menjadi Kepala SCAF menggantikan Mohamed Hussein Tantawi justru mengambil langkah penggulingan kekuasaan terhadap dirinya setelah ia menolak ultimatum. Tepatnya pada 3 Juli 2013 malam, SCAF di bawah komando Al Sisi mengambil alih kekuasaan Presiden Mursi secara paksa. Tidak dipungkiri, kudeta militer yang mengakhiri kekuasaan Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis merupakan bentuk pencederaan demokratisasi di Mesir (Harian Suara Merdeka, 2013).

Pasca kudeta yang menggulingkan pemerintahan demokrasi Mursi, dominasi militer di bawah Abdel Fattah Al Sisi menguasai panggung politik. Ketua Mahkamah

Konstitusi Mesir, Adly Mansour ditunjuk sebagai presiden pemerintahan sementara hingga pemilu presiden selanjutnya. Pemilu presiden yang digelar pada tahun 2014 hanya diikuti oleh dua kandidat. Pada 24 Mei 2014, Abdel Fattah Al Sisi yang mengajukan diri sebagai kandidat mendapat kemenangan mutlak mengalahkan lawan politiknya Hamdeen Sabahi yang merupakan tokoh kelompok *Nasseris* (Basyar, 2015).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Karakteristik Pemerintah Otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca Kudeta Militer tahun 2013?

D. Kerangka Pemikiran

Sejak rezim otoriter meluas di negara-negara industri di Amerika Latin selama kurun waktu 1964 hingga 1973 yaitu di Brazil, Argentina, Uruguay dan Chili, mendorong para ilmuan untuk mempelajari efek industrialisasi terhadap politik. Salah satunya adalah Guillermo O'Donnell yang mencetuskan teori model Otoriter Birokratik (OB) dalam menjelaskan gejala otoritarianisme baru yang dialami negara industri baru. Dalam teori ini, O'Donnell menegaskan peran para teknokrat dalam perubahan politik. Hal ini yang membedakan gagasannya dari teori modernisasi

lainnya dengan menyatakan bahwa negara-negara industri baru memiliki kecenderungan untuk menghasilkan otoritarianisme dalam proses industrialisasi mereka (Won & Djafar, 2016)

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai karakteristik pemerintah otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer tahun 2013, penulis menggunakan teori model Otoriter Birokratik (OB) yang dicetuskan oleh Guillermo O'Donnell tersebut. Teori ini diambil dari buku Mohtar Mas'ood yang berjudul "Ekonomi dan Politik (Orde Baru 1966 - 1971)". Menurut O'Donnell, model rezim OB memiliki sifat-sifat berikut (Mas'ood, 1989):

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan "teknokrat" sipil. Ia mengemukakan, bahwa pengalaman otoritarian yang ia kategorikan ke dalam rezim OB seperti di Amerika Latin terbentuk atas peran serta dari para teknokrat dan militer profesional.
2. Pemerintah didukung oleh *entrepreneur* oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Menurut O'Donnell, model rezim OB sebagian besar lebih menyandarkan pada sebuah koalisi antara elit-elit militer dengan pihak teknokrat bisnis yang dalam kerjanya memiliki keterkaitan atau asosiasi secara langsung dengan pemodal asing. Untuk itu dalam teori ini O'Donnell sangat mengaitkan masalah otoritarianisme dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada awalnya, negara-negara OB yang mengembangkan model industrialisasi lebih mengandalkan pada industri substitusi impor. Namun

dalam perkembangannya, strategi ini tidak cukup berhasil, karena produk yang tidak kompetitif dan tingginya biaya faktor-faktor produksi. Dalam hal ini, negara-negara OB kemudian beralih ke strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Strategi ini bertujuan untuk menarik dukungan langsung dari pemodal asing sehingga mampu menciptakan pasaran di dalam maupun luar negeri serta menjaga keberlangsungan ekonomi jangka panjang.

3. Pengambilan keputusan dalam rezim OB bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam pembuatan kebijakan yang memerlukan suatu proses *bargaining* yang lama di antara berbagai kelompok kepentingan. Rezim Otoriter Birokratik ini bertujuan membuat keputusan yang sederhana, tepat dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses tawar-menawar atau *bargaining* yang lama, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan “teknokratik-birokratik” dengan pertimbangan semata-mata “efisiensi”. Rezim ini didukung oleh unsur koalisinya dari kelompok-kelompok yang paling mungkin dapat mendukung proses pembangunan yang efisien yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal (baik domestik maupun luar negeri).
4. Massa didemobilisasikan. Melalui kebijakan pemerintah dan ketetapan undang-undang, pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam dunia politik. Di dalam kehidupan politik, negara OB berusaha untuk menyingkirkan massa dan menekan berbagai aktifitas politik yang kritis. Berbagai upaya dilakukan untuk membatasi dan mengontrol saluran dan akses organisasi massa secara ketat.

5. Untuk mengendalikan opisisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif. Kekerasan politik memang cenderung terjadi pada suatu sistem pemerintahan yang sangat otoriter-birokratis. Kekerasan politik berupa penghilangan orang, penangkapan, hingga pemberian hukuman hampir selalu digunakan oleh rezim otoriter yang berkuasa dengan alasan demi mempertahankan keutuhan bangsa. Selain itu, kekerasan politik dengan negara sebagai aktor utamanya juga didukung oleh pengaruh militer yang kuat dalam pemerintahan, bahkan pada taraf mengendalikan.

Di dalam isu demokratisasi di Timur Tengah, dinamika kehidupan politik mengalami fluktuasi. Hal ini juga terjadi di Mesir. Eksistensi demokrasi di Mesir masih dikatakan belum berkembang secara utuh. Pada tahun 2014, Mesir di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al Sisi justru berujung pada penghidupan kembali rezim otoriter dimana sebelumnya upaya demokratisasi telah bangkit pasca revolusi Mesir 2011. Hal ini ditunjukkan oleh Presiden Al Sisi melalui karakteristik pemerintah otoriter yang mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB) yang dicetuskan Guillermo O'Donnell, yaitu:

Pertama, pemerintah Mesir dipegang oleh militer tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan “teknokrat” sipil. Di dalam memimpin Mesir, selain menjalankan pemerintahan yang bersifat militeristik,

Presiden Al Sisi juga menempatkan beberapa teknokrat sipil sejak dirinya berkuasa di Mesir pasca kudeta militer tahun 2013 (Haryono, 2014).

Kedua, massa didemobilisasikan. Sebagai upaya membatasi ruang gerak kubu oposisi dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat politik nasional, Presiden Al Sisi membubarkan Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party-FJP*) yang merupakan sayap politik kubu oposisi Ikhwanul Muslimin (BBC Indonesia, 2014).

Ketiga, untuk mengendalikan oposisi, pemerintah Mesir melakukan tindakan-tindakan represif. Kekerasan politik memang cenderung terjadi pada suatu sistem pemerintahan yang otoriter. Dalam memimpin Mesir, Presiden Al Sisi mengambil langkah represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin karena telah menentang kebijakan pemerintah. Sejumlah peristiwa yang menunjukkan peningkatan tindakan represif yang dilakukan Presiden Al Sisi terhadap anggota IM antara lain, penyiksaan, pembunuhan, penangkapan sepihak hingga vonis hukuman yang tidak adil (IRIB World Service, 2014).

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat menarik hipotesis bahwa pemerintah otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel

Fattah Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB) yaitu:

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan “teknokrat” sipil’.
2. Massa didemobilisasikan.
3. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif.

F. Metode Penelitian

1. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membatasi jangka waktu agar tidak terlalu meluas yaitu antara tahun 2013 hingga tahun 2015. Tahun 2013 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun itulah terjadinya kudeta militer Mesir yang dipimpin oleh Abdel Fattah Al Sisi dan berhasil menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, pemimpin rezim demokrasi Mesir pada saat itu. Momentum ini menjadi titik awal bangkitnya kembali rezim otoriter di Mesir. Sedangkan pada tahun 2015, digunakan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun itu tepat 1 tahun Abdel Fattah Al Sisi menjabat sebagai presiden Mesir setelah melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi. Serangkaian peristiwa dan pergolakan politik selama 1 tahun kepemimpinan Al Sisi dinilai cukup menjadi acuan yang nantinya akan dikaji ulang untuk mengetahui bagaimana

karakteristik pemerintah otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer tahun 2013

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar dapat mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, situs website serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diambil penulis.

G. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dalam hal perkembangan pemerintahan negara Mesir era Abdel Fattah Al Sisi.
2. Untuk mengetahui pergolakan politik di Mesir pasca revolusi *Arab Spring* dan bangkitnya kembali rezim otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah Al Sisi.

3. Untuk memahami karakteristik pemerintahan otoriter Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer tahun 2013.
4. Sebagai perwujudan atas teori-teori yang penulis terima di bangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
5. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran atau teori yang relevan untuk membantu dalam menganalisa masalah yang terjadi, setelahnya akan ditarik sebuah hipotesa yang nantinya akan dianalisa lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Pada bab ini juga akan diterangkan bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan jangkauan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data.

BAB II pemaparan mengenai politik pemerintahan di Mesir sejak pemerintahan Mesir dipimpin oleh rezim-rezim otoriter hingga bergulirnya demokrasi di Timur Tengah. Pembahasan ini mengerucut

pada kronologi Revolusi *Arab Spring* 2011 hingga transisi demokrasi pasca *Arab Spring*.

BAB III berisi pembahasan mengenai runtuhnya demokrasi dan kembalinya rezim otoriter baru di Mesir. Dalam bab ini, sebelumnya akan dibahas mengenai pemerintahan demokrasi Mesir di bawah Presiden Muhammad Mursi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kronologi kudeta militer tahun 2013 di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi dan diakhiri dengan pembahasan pemerintahan Mesir di bawah dominasi militer Abdel Fattah Al Sisi.

BAB IV berisi tentang pembahasan karakteristik pemerintah Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi pasca kudeta militer tahun 2013 dimana karakteristik pertama yaitu pemerintah Mesir dipegang oleh militer yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Kedua, presiden Abdel Fattah Al Sisi juga membatasi kebebasan sipil dalam kehidupan politik dan pemerintahan atau demobilisasi massa. Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup, penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan dan kata penutup berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.